



PERAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

Ramadhan Agung Suriansya^a, Shabrina Aulia Adam^{b*}

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Sosiologi; ramadhanagungsuriansya56@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Surabaya

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Jurusan Manajemen; shabrinadam@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Surabaya

*Penulis Korespondensi: Shabrina Aulia Adam

ABSTRACT

Youth development is a strategic aspect of enhancing human resource quality and regional competitiveness, which in Indonesia is measured through the Youth Development Index (YDI) covering five domains: education, health and well-being, employment opportunities, participation and leadership, and gender and discrimination. East Java Province has a large youth population and a YDI score comparable to the national average; however, several indicators remain stagnant or vulnerable, particularly in the domains of health and well-being and employment. This condition raises questions about the extent to which youth policies and programs implemented by the East Java Provincial Youth and Sports Office (Dispora Jatim) contribute to improving the YDI. This study aims to analyze the role of Dispora Jatim's policies and programs in enhancing the YDI and to identify gaps between program design and YDI indicators. Using a descriptive-analytical approach, this research applies public policy analysis and secondary data analysis based on the 2023 YDI report, the 2025–2026 Strategic Plan of Dispora Jatim, and supporting statistical data. The findings indicate that while Dispora Jatim's programs are normatively aligned with YDI dimensions, their impact on several indicators remains limited due to a stronger emphasis on program outputs rather than sustainable social outcomes, highlighting the need for YDI-based policy evaluation and stronger cross-sectoral integration in youth development.

Keywords: youth policy; Youth Development Index; Dispora Jawa Timur; youth development

Abstrak

Pembangunan pemuda merupakan aspek strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, yang secara nasional diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemuda yang besar dan capaian IPP yang setara dengan rata-rata nasional, namun beberapa indikator masih menunjukkan stagnasi dan kerentanan, khususnya pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan dan kesempatan kerja. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan dan program kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Dispora Jatim) berkontribusi terhadap peningkatan IPP. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan dan program Dispora Jatim dalam peningkatan IPP serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain program dan capaian indikator IPP. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan analisis kebijakan publik dan analisis data sekunder, meliputi laporan IPP 2023, dokumen Rencana Strategis Dispora Jatim 2025–2026, serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dispora Jatim secara normatif telah selaras dengan dimensi IPP, namun dampaknya terhadap beberapa indikator masih terbatas karena dominannya orientasi pada output program dibandingkan outcome sosial yang berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan evaluasi kebijakan berbasis IPP dan integrasi lintas sektor dalam pembangunan pemuda.

Kata Kunci: kebijakan kepemudaan; Indeks Pembangunan Pemuda; Dispora Jawa Timur; pembangunan pemuda

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pemuda merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa. Untuk mengukur capaian pembangunan pemuda di Indonesia secara komprehensif, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai instrumen ukur yang mencakup lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Data Kemenpora tahun 2024, menunjukkan bahwa IPP Indonesia mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 hingga 2023, yaitu nilai IPP tahun 2015 sebesar 48,67 menjadi 56,33 pada tahun 2023. Walaupun mengalami peningkatan, IPP tahun 2023 hanya meningkat sebesar 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 55,33 pada tahun 2022 menjadi 56,33 pada tahun 2023 (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya laju peningkatan yang relatif lambat dan sebagian domain masih menunjukkan stagnasi atau penurunan. Tren tersebut menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat strategi pembangunan pemuda secara berkelanjutan.

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemuda yang signifikan. Menurut laporan dari BPS tahun 2023, sekitar 21,09% penduduk Jawa Timur merupakan penduduk berusia 16-30 tahun (BPS, 2024). Jumlah persentase ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar dan apabila pemuda ini diimbangi dengan penguatan kapasitas dan kualitas yang mumpuni akan mampu melahirkan calon pemimpin yang berkarakter. Disamping persentase jumlah pemuda, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan nilai IPP sama dengan nilai rata-rata nasional menurut data IPP 2023, yang mencerminkan peran penting kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan kepemudaan. IPP Jawa Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 55,50, mengalami kenaikan satu poin menjadi 56,50 pada tahun 2023. Dua indikator dengan nilai lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu persentase APK Sekolah Menengah sebesar 91,86 persen sedangkan untuk skor rata-rata nasional yaitu 89,37 persen. Selain itu, indikator pemuda wirausaha kerah putih yaitu 0,66 persen dan lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional sebesar 0,53 persen.

Namun, capaian IPP pada beberapa domain menunjukkan adanya kerentanan dan peluang perbaikan. Tantangan utama Provinsi Jawa Timur terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang memiliki skor cenderung tertinggal dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh melemahnya capaian indikator persentase pemuda yang merokok yang cenderung meningkat serta memiliki nilai diatas rata-rata nasional yaitu 26,01 persen (nasional 24,75 persen). Selain itu, persentase remaja perempuan yang sedang hamil memiliki skor masih diatas capaian rata-rata nasional yaitu 18,96 persen. Disisi lain, angka perkawinan usia dini memperoleh skor relatif tinggi yaitu 8,86 persen dengan skor masih diatas nasional yaitu 6,92 persen. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja perlu diperhatikan juga untuk indikator pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda memiliki skor yang cenderung stagnan dan untuk TPT pemuda mengalami peningkatan dari 12,98 persen menjadi 12,86.

Untuk menjawab tantangan pembangunan pemuda tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Dispora Jatim) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dispora Jatim Tahun 2025–2026 sebagai instrumen kebijakan yang secara langsung diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing pemuda. Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif perencanaan, tetapi menjadi kerangka strategis dalam mewujudkan visi pembangunan pemuda Jawa Timur yang mandiri, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam misi Dispora Jatim yang menekankan penguatan kapasitas kepemudaan, perluasan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pemuda, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, dan olahraga.

Implementasi visi dan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai program kepemudaan yang relevan dengan dimensi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), seperti Youth Creativepreneur Centre (YC2) yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi pemuda, program pelatihan kepemimpinan dan penguatan organisasi kepemudaan yang mendukung peningkatan partisipasi serta kepemimpinan pemuda, serta program Pemuda Pelopor yang mendorong peran aktif pemuda dalam inovasi sosial di tingkat lokal. Selain itu, program pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi massal turut berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pemuda sebagai salah satu domain IPP. Dengan demikian, Renstra Dispora Jatim dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan

pembangunan pemuda, sekaligus sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan capaian IPP Jawa Timur secara berkelanjutan.

Meskipun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah digunakan secara nasional untuk mengukur capaian pembangunan pemuda, kajian yang mengaitkan secara langsung kebijakan dan program kepemudaan daerah dengan capaian IPP masih terbatas, khususnya pada tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dan program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan IPP dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis kebijakan publik berbasis data sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis keterkaitan program kepemudaan daerah dengan indikator IPP sebagai instrumen evaluasi kebijakan pembangunan pemuda. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat kontribusi akademik dalam kajian sosiologi kebijakan pemuda sekaligus memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan kepemudaan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda adalah instrumen komposit yang dirancang oleh Kemepora bersama BPS dan sejumlah lembaga teknis untuk memberikan gambaran capaian pembangunan pemuda secara komprehensif berdasarkan lima domain utama: pendidikan, kesehatan & kesejahteraan, lapangan kerja, partisipasi & kepemimpinan, serta gender & diskriminasi. Pengukuran ini memungkinkan perbandingan capaian pembangunan antar wilayah dan waktu serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan. Berikut ini merupakan domain dan indikator-indikator dalam penilaian IPP menurut Kemepora [1].

a. Domain Pendidikan

- Rata-rata lama sekolah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi

b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

- Angka kesakitan pemuda
- Persentase pemuda korban kejahatan
- Persentase pemuda yang merokok
- Persentase remaja perempuan yang sedang hamil

c. Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja

- Persentase pemuda wiraswasta kerah putih
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda

d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

- Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
- Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
- Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat

e. Domain Gender dan Diskriminasi

- Angka perkawinan usia anak
- Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas
- Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

2.2. Teori Kebijakan Publik: Kebijakan Sebagai Proses

Dalam kajian kebijakan publik, kebijakan tidak dipahami semata-mata sebagai keputusan formal pemerintah, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang mencakup apa yang pemerintah lakukan maupun tidak lakukan dalam merespons suatu masalah publik (Dye 2013 dalam Muadi et al., 2016). Perspektif ini menempatkan kebijakan sebagai sebuah proses yang dinamis, mulai dari perumusan agenda, perancangan program, implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan. Dengan demikian, keberadaan dokumen kebijakan dan program tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tahapan implementasi dan evaluasi tidak berjalan secara efektif.

Howlett dan Ramesh (2003) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh keterkaitan antara *policy implementation* dan *policy outcome*[1]. Banyak kebijakan publik mengalami kegagalan bukan karena kesalahan dalam perumusan tujuan, melainkan akibat lemahnya implementasi, koordinasi antaraktor, serta ketiadaan mekanisme evaluasi berbasis hasil. Dalam konteks pembangunan pemuda, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan mengapa berbagai program kepemudaan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan capaian indikator pembangunan pemuda secara merata, sebagaimana tercermin dalam dinamika IPP.

2.3. Sosiologi Kebijakan Kepemudaan

Dari sudut pandang sosiologi, kebijakan kepemudaan berkaitan erat dengan posisi pemuda sebagai kelompok sosial yang berada dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Checkoway (2011) menyatakan bahwa pembangunan pemuda akan lebih efektif apabila pemuda diposisikan sebagai aktor sosial yang memiliki kapasitas dan peran aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai objek penerima program[2]. Kebijakan yang bersifat top-down dan minim partisipasi berpotensi menghasilkan program yang kurang responsif terhadap kebutuhan riil pemuda.

Wyn dan White (1997) mengkritik kebijakan kepemudaan yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan ketimpangan struktural, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesempatan kerja, dan ruang partisipasi sosial[3]. Akibatnya, kebijakan sering kali berorientasi pada *output* program tanpa mampu menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Kerangka ini relevan untuk menganalisis domain IPP terkait partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi, terutama ketika capaian indikator menunjukkan stagnasi meskipun program kepemudaan telah dilaksanakan.

2.4. Sosiologi Olahraga dan Kesejahteraan Pemuda

Dalam kajian sosiologi olahraga, terdapat kritik terhadap asumsi normatif bahwa olahraga secara otomatis menghasilkan dampak sosial positif. Coalter (2007) menegaskan bahwa program olahraga sering dibebani ekspektasi sosial yang berlebihan, padahal dampaknya sangat bergantung pada desain kebijakan, konteks sosial, dan integrasi dengan sektor lain[4]. Program olahraga yang berfokus pada partisipasi atau event semata cenderung menghasilkan dampak jangka pendek tanpa perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Spaaij (2012) menambahkan bahwa kontribusi olahraga terhadap kesejahteraan sosial akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan[5]. Dalam konteks pembangunan pemuda, pendekatan lintas sektor ini menjadi penting untuk menjelaskan dinamika capaian domain kesehatan dan kesejahteraan dalam IPP. Dengan demikian, stagnasi atau penurunan indikator kesehatan pemuda dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kebijakan olahraga yang belum terintegrasi secara optimal dalam kerangka pembangunan sosial yang lebih luas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan fokus pada analisis kebijakan publik dan analisis data sekunder, khususnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menjelaskan hubungan antara kebijakan/program Dispora Jatim dengan capaian IPP sebagai indikator pembangunan pemuda. Adapun untuk sumber data yang dianalisis meliputi, Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2023 dari Kemenpora sebagai sumber data indikator IPP dan nilai domain-domainnya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dispora Jatim Tahun 2025–2026 yang memuat tujuan strategis, program, strategi kebijakan, dan indikator kinerja yang berkaitan dengan pembangunan pemuda daerah, dan Statistik kependudukan dan indikator pemuda dari BPS dan sumber resmi lainnya (jika dibutuhkan) sebagai pelengkap perspektif analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Pemetaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur

Program Jawa Timur	Deskripsi Program	Singkat	Dimensi Terkait	IPP & Indikator IPP yang Relevan	Arah Dampak terhadap IPP
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, seperti	Pelatihan kewirausahaan, inkubasi	bisnis	Lapangan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda bekerja /wirausaha	Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda

Youth Creativepreneur Centre (YC2)	pemuda, penguatan UMKM pemuda				
Pelatihan Kepemimpinan, kepramukaan & Organisasi Kepemudaan	Capacity building OKP, pelatihan kepemimpinan, FGD kepemudaan	Partisipasi & Kepemimpinan	Partisipasi & pengambilan keputusan	Partisipasi pemuda dalam organisasi & pengambilan keputusan	Meningkatkan modal sosial & kepemimpinan
Pemuda Pelopor / Pemuda Utama	Seleksi, pembinaan, dan apresiasi pemuda berprestasi	Partisipasi & Kepemimpinan	Partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial	Partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial	Penguatan peran sosial pemuda
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	Event olahraga multi-cabang tingkat provinsi	Kesehatan & Kesejahteraan	Aktivitas fisik & gaya hidup sehat	Aktivitas fisik & gaya hidup sehat	Mendorong partisipasi olahraga pemuda
Pembinaan Atlet & Olahraga Prestasi	Pembinaan atlet muda, beasiswa olahraga, pemusatan latihan	Kesehatan & Kesejahteraan	Kondisi fisik dan kebugaran pemuda	Kondisi fisik dan kebugaran pemuda	Dampak tidak langsung terhadap kesehatan
Kegiatan Olahraga Massal (senam, fun run, gerak jalan, festival olahraga)	Olahraga rekreatif dan massal berbasis komunitas	Kesehatan & Kesejahteraan	Partisipasi aktivitas fisik	Partisipasi aktivitas fisik	Meningkatkan kesadaran hidup sehat
Kegiatan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) dan Pembinaan Kader Anti Narkoba	Program preventif dalam upaya pencegahan kanker payudara dan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda	Kesehatan & Kesejahteraan	Kesehatan fisik dan gaya hidup sehat	Kesehatan fisik dan gaya hidup sehat	Dampak langsung terhadap kondisi kesehatan
Sosialisasi Program Beasiswa LPDP Bidang Keolahragaan	Dukungan bagi atlet, pelatih, dan tenaga pendukung agar dapat melanjutkan pendidikan	Pendidikan	Peningkatan partisipasi sekolah menengah atau perguruan tinggi	Peningkatan partisipasi sekolah menengah atau perguruan tinggi	Meningkatkan kualitas kognitif dan potensi
Program Kepemudaan Inklusif	Keterlibatan pemuda lintas gender dan latar belakang sosial	Gender & Diskriminasi	Kesetaraan akses dan partisipasi pemuda	Kesetaraan akses dan partisipasi pemuda	Mendorong inklusivitas pemuda

Sumber: data diolah peneliti dari Rencana Strategis (Renstra) Dispora Jatim Tahun 2025–2026 [6]

Tabel pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar program Dispora Jawa Timur memiliki keterkaitan langsung dengan domain partisipasi dan kepemimpinan serta lapangan dan kesempatan kerja. Program seperti YC2 dan pelatihan kepemimpinan secara konseptual sejalan dengan indikator IPP terkait kewirausahaan dan partisipasi sosial pemuda. Namun, capaian IPP menunjukkan bahwa domain lapangan dan kesempatan kerja perlu diperhatikan untuk indikator pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda memiliki skor yang cenderung stagnan, meskipun wirausaha kerah putih memiliki nilai persentase di atas nilai rata-rata. Rekomendasi kebijakan untuk menanggulangi permasalahan di daerahnya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi dan setelahnya dapat mengadakan Job Fair atau bursa kerja. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja serta melakukankoordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda.

Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, meskipun Dispora Jatim mengimplementasikan berbagai program olahraga prestasi dan olahraga massal, dampaknya terhadap indikator kesehatan pemuda belum signifikan, khususnya pada indikator persentase pemuda yang merokok cenderung meningkat. Secara sosiologis, perilaku merokok pada pemuda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh norma sosial, lingkungan pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial di ruang publik. Hal ini menguatkan pandangan Coalter (2007) bahwa program olahraga yang bersifat event-based dan berorientasi partisipasi semata tidak secara

otomatis menghasilkan perbaikan kesejahteraan sosial dan kesehatan. Tanpa integrasi dengan kebijakan kesehatan promotive dan preventif, serta adanya perubahan perilaku, intervensi olahraga cenderung menghasilkan dampak jangka pendek. Walaupun Dispora Jatim telah mengadakan Pembinaan Kader Anti Narkoba, terkadang rokok tidak dimasukkan eksplisit dalam materi. Dengan demikian, pemberian edukasi mengenai bahaya merokok sebaiknya mulai dimasifkan dengan melakukan sosialisasi kesehatan penyakit TB sebagai salah satu akibat dari merokok baik perokok aktif maupun pasif.

Disamping indikator persentase pemuda yang merokok, tingginya persentase remaja perempuan yang sedang hamil juga tercatat signifikan. Hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan sosial dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi pemuda perempuan. Kebijakan kepemudaan yang ada cenderung bersifat netral gender dan belum secara spesifik menargetkan kerentanan yang dialami pemuda perempuan. Meskipun Dispora Jatim pernah mengadakan kegiatan program SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) yang terkait dengan dimensi IPP, yakni gender dan diskriminasi, namun SADANIS ini fokus pada deteksi dini kanker payudara saja, bukan edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan kehamilan dini. Program ini umumnya menasar perempuan usia dewasa, tetapi kurang relevan secara langsung terhadap indikator IPP remaja perempuan yang sedang hamil.

Selain itu, temuan menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan antara tujuan strategis Renstra Dispora Jatim dan indikator IPP yang digunakan sebagai ukuran pembangunan pemuda. Ketiadaan mekanisme evaluasi berbasis IPP menyebabkan program kepemudaan sulit diukur kontribusinya secara empiris. Secara sosiologis, kondisi ini mencerminkan problem klasik kebijakan publik, yaitu kuatnya orientasi pada output program dibandingkan outcome sosial yang berkelanjutan. output program menunjukkan apa yang telah dilakukan pemerintah, sedangkan outcome sosial menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Contoh konkret dalam konteks Dispora dan IPP Jawa Timur, program olahraga sudah berjalan, baik olahraga prestasi ataupun olahraga massal, dengan output program seperti pembinaan atlet, festival olahraga, namun tidak dapat mencapai outcome yang diharapkan, yakni penurunan perilaku merokok pada pemuda. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aktivitas kebijakan dan dampak sosialnya, yang berimplikasi pada bertahannya masalah struktural pemuda seperti rendahnya kesehatan, keterbatasan kesempatan kerja, dan minimnya partisipasi sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Dispora Jawa Timur secara normatif telah selaras dengan dimensi Indeks Pembangunan Pemuda, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan capaian IPP secara merata. Kesenjangan terutama terlihat pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan dan kesempatan kerja, yang menunjukkan bahwa keberadaan program belum secara otomatis menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis outcome dan indikator pembangunan pemuda.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memperkuat integrasi kebijakan kepemudaan lintas sektor, khususnya antara Dispora, dinas kesehatan, dan dinas ketenagakerjaan, agar program kepemudaan memiliki dampak struktural yang lebih kuat. Selain itu, IPP perlu dimanfaatkan secara lebih sistematis sebagai instrumen evaluasi kebijakan, bukan sekadar alat ukur statistik. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif antar provinsi atau analisis mikro pada tingkat kabupaten/kota untuk memperkaya pemahaman tentang efektivitas kebijakan pembangunan pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Pemuda dan Olahraga, "Laporan IPP 2024," pp. 1–108, 2024, [Online]. Available: https://satudata.kemenpora.go.id/dataset/9c0a3672-f9d4-46f3-aa15-175dfdf996f3/resource/7afc4ad0-a341-4e2e-b2af-920152feba16/download/laporan-ipp-2024_compressed.pdf
- [2] BPS, "Statistik Pemuda Jawa Timur 2023," p. xiv + 105, 2024.
- [3] S. Muadi, M. H. Ismail, and A. Sofwani, "Concept and Theory of Public Policy Formulation," *Jurnal Review Politik*, vol. 06, no. 2, pp. 195–224, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.fuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>
- [4] M. Howlett and M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford

- University Press, 2003. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=eRytQgAACAAJ>
- [5] B. Checkoway, “What is youth participation?,” *Children and Youth Services Review*, vol. 33, no. 2, pp. 340–345, 2011, doi: 10.1016/j.childyouth.2010.09.017.
- [6] J. Wyn and R. White, *Rethinking Youth*. in *Studies in society*. SAGE Publications, 1996. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=g8iIKrAckNQC>
- [7] F. Coalter, *A Wider Social Role for Sport Who’s Keeping the Score?*, 1st ed. Taylor & Francis e-Library, 2007.
- [8] R. Spaaij, “Beyond the playing field: Experiences of sport, social capital, and integration among Somalis in Australia,” *Ethnic and Racial Studies*, vol. 35, no. 9, pp. 1519–1538, 2012, doi: 10.1080/01419870.2011.592205.
- [9] Dispora Jatim, “Rancangan Akhir RENSTRA (Rencana Strategis),” 2024, [Online]. Available: <http://dispورا.jatimprov.go.id>